



# Upaya Brida Jawa Timur dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah

Rendi Trio Afrianto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3192>

\*Correspondence: Rendi Trio Afrianto

Email: [renncl69@gmail.com](mailto:renncl69@gmail.com)

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji tentang peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur untuk mendorong kualitas pelayanan publik di daerah dari pedesaan hingga ke kota. dengan menggunakan skema AGIL oleh Talcott Parsons dalam teori fungsionalisme struktural untuk menganalisis fungsi, peran, dan hasil yang dicapai oleh BRIDA Jawa Timur sebagai salah satu bagian sistem sosial dan fungsional pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perolehan data yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap pelaksanaan program Inotek Award yang menjadi wadah aktualisasi inovasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRIDA tidak hanya bertindak sebagai fasilitator inovasi, tetapi juga sebagai penghubung antara hasil riset akademik dan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Inovasi yang dikembangkan BRIDA, seperti program pelatihan, kompetisi inovasi, serta penerapan teknologi tepat guna, berkontribusi signifikan terhadap efisiensi, akuntabilitas, dan inklusivitas pelayanan publik. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya literasi teknologi ASN, dan lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan dalam optimalisasi inovasi daerah. Oleh sebab itu pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap kebijakan yang akan diberikan atau dibuat dengan memperhatikan kondisi atau situasi sebenarnya yang ada pada masyarakat guna terbentuknya kebijakan yang tepat.

**Kata Kunci:** BRIDA, Pelayanan Publik, Riset Kebijakan, Inovasi Daerah, Jawa Timur, Inotek Award, Evidence-Based Policy.

## Pendahuluan

Di Tengah perkembangan zaman pada saat ini yang semakin pesat para perangkat daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang inovatif, responsif, serta mudah untuk diakses oleh masyarakat luas. Dalam hal ini peranan lembaga riset dan inovasi yang mampu mengelola hasil temuan masyarakat serta membimbing Lembaga atau OPD lain agar dapat ikut serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka sangat krusial. Hal ini dikarenakan salah satu indikator dari terwujudnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya pelayanan publik yang berkualitas (Agustinus & Sahatapy, 2022). Untuk tercapai pelayanan publik yang efektif dan juga efisien diperlukan pendekatan kepada masyarakat dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga adaptif guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Seperti apa yang dijelaskan oleh (Engkus et al, 2021) bahwa kunci dari

terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas adalah adanya tata kelola pemerintahan yang baik, responsif dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur hadir dengan menyanggah peran kunci yakni sebagai ujung tombak untuk mendorong agar tercapainya pembangunan di daerah dengan cara mengelola dan memfasilitasi hasil riset dan juga inovasi yang telah ada. Dengan melakukan kerjasama dan menggandeng antar badan, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan juga perguruan tinggi di Jawa Timur dengan harapan agar tercapainya inovasi-inovasi yang terintegrasi dan juga aplikatif yang sesuai dengan nilai Good Governance (Siti et al, 2016). Dengan kerjasama yang dilakukan oleh Brida Jawa Timur bersama berbagai macam dan instansi tersebut telah menunjukkan bahwa Brida Jawa Timur tidak hanya merencanakan program program yang berkaitan dengan inovasi, melainkan Brida Jawa Timur juga berpartisipasi sebagai pelaku dalam pelaksanaan inovasi. Melalui kerjasama ini BRIDA berkontribusi dalam peningkatan kualitas aparatur serta mendorong pemanfaatan penggunaan teknologi informasi digital. Selain itu BRIDA juga membangun jiwa saing pelayann publik tingkat daerah melalui kompetisi inovasi seperti Inotek Award ataupun IGA (Innovative Government Award).

Dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih guna mampu terus menjawab kebutuhan masyarakat pada masa sekarang ini yang semakin kompleks dan beragam. Pelayanan publik kini harusnya tidak lagi bersifat birokratis dan kaku, melainkan harus mulai menerapkan nilai transparansi, efisien, dan adaptabilitas (Septiani et al, 2022). Selain itu pengaruh dari gencarnya penggunaan media internet pada masyarakat juga menjadi tuntutan bagi para penyedia layanan publik agar mampu memberikan pelayanan yang baik dan transparan, kualitas pelayanan yang rendah akan langsung berdampak terhadap rasa kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah tak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan administratif, tetapi juga dituntut untuk merubah pandangan terhadap pelayanan publik yang tak hanya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban birokrasi melainkan sebagai sebuah sarana untuk memberdayakan masyarakat (Iskandar et al, n.d.).

Dalam pelaksanaannya pengembangan inovasi di daerah tidak bisa berjalan efektif tanpa adanya dukungan ekosistem yang kondusif (Syamsuddin & Fuady, 2020). Banyak daerah menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran riset, serta kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu juga dibutuhkan upaya sistematis untuk menumbuhkan budaya inovatif di tingkat lokal melalui pelatihan, kolaborasi, dan penghargaan terhadap ide-ide kreatif masyarakat. Pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi bagi warga, komunitas, dan akademisi agar mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi terhadap persoalan publik (Judijanto et al, 2023). Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses inovasi, maka hasil yang diperoleh akan lebih relevan dan memiliki dampak sosial yang lebih luas. Pendekatan partisipatif ini juga mampu memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik yang mereka nikmati.

Ditengah era digitalisasi penerapan nilai tranparansi menjadi salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pemerintahan, serta untuk mendukung terwujudnya prinsip good governance (Trisakti et al, n.d.). Selain menerapkan nilai transparansi pemerintah juga perlu menerapkan nilai akuntabilitas, efektivitas dan resposivitas dalam proses pelayanan. Ketika nilai-nilai tersebut telah dicapai dan diterapkan oleh pemerintah, rasa kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan muncul terhadap berbagai macam layanan publik yang ada. Pada dasarnya good governance sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintahan. Dalam mencapai hal tersebut, birokrasi yang buruk dan ada pada banyak lembaga pemerintahan saat ini merupakan salah satu hal yang perlu untuk dihapus dan ditinggalkan (Ponto et al, 2024).

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dalam mengkaji dan menjelaskan tentang upaya BRIDA Jawa Timur terhadap upaya peningkatan kualitas pelayann publik di daerah. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti bersumber dari informan kunci yang dipilih secara purpoive sampling yakni sebagai ketua pelaksana dan tim penyelenggara kegiatan Inotek Award 2025. Dalam mendapatkan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan juga observsi secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh BRIDA. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap akhir data akan diintrepetasikan secara kualitataif denagn menggunakan acuan terhadap teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dalam melihat bagaimana BRIDA dapat menjalankan perannya sebagai bagian dari sistem sosial dalam pemerintah daerah.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Dasar Riset, Inovasi, dan Pelayanan Publik

Dalam konteks kebijakan publik serta inovasi daerah, riset memiliki definisi sebagai suatu langkah yang sistematis dengan tujuan mendapatkan ilmu pengetahuan baru atau guna memperdalam pemahaman dalam permasalahan tertentu yang dilakukan dengan metode yang terstruktur. Sebagai bentuk dalam proses pengambilan keputusan yang tepat, riset sendiri memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, tahapan tersebut diantaranya identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan temuan. Menurut (Asmara, 2016) dalam praktik pelaksanaannya, riset sendiri berfungsi sebagai pondasi utama dalam melahirkan inovasi karena mampu memberikan dasar kebijakan yang rasional dalam merancang solusi yang berbasis data. Di dalam dunia pemerintahan sendiri riset yang dilakukan juga harus berdasarkan evidence-based policy atau kebijakan yang berbasis bukti, ini dapat mendorong pemerintah daerah agar mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga kebijakan yang diambil dapat bersifat efektif, selain itu agar keputusan tetap diambil lebih terukur dan akuntabel (Haniyuhana & Widiyarta, 2023). Hasil riset juga harus dilakukan evaluasi program baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam proses pembentukan sistem pemerintahan dari government menjadi governance perlu melakukan pendekatan pendekatan yang baru agar sistem tersebut dapat terwujud. Kolaborasi antar sektor dan juga penyampaian pelayanan kepada publik merupakan beberapa contoh cakupan inovasi dalam sektor pelayanan publik. Dalam hal ini pemerintah daerah selain dituntut untuk mendorong inovasi yang mereka miliki mereka juga diminta agar mampu mewujudkan struktur birokrasi yang baik serta membentuk hubungan atau interaksi yang baik pula dengan warga masyarakat. Karena suatu hasil inovasi yang baik pasti berasal dari pemahaman yang tepat akan kebutuhan masyarakat itu sendiri (Sururi, 2017).

Indikator dari pelayanan publik yang berkualitas ialah adanya kemudahan akses atau aksesibilitas, efisiensi, responsivitas serta transparansi dalam pelayanannya (Finanda et al, 2024). Saat ini kualitas pelayanan publik merupakan sebuah alat ukur dalam menilai suatu keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan publik juga berfungsi sebagai simbol pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara dengan memberikan penyediaan barang ataupun jasa bagi seluruh warga masyarakat tanpa membeda bedakan (*Lestari & Santoso, 2022*). Layanan publik tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif semata akan tetapi juga sebagai simbol hubungan antara masyarakat dan negara yang mencerminkan nilai nilai integritas pemerintahan. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan yang profesional, partisipatif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan begitu undang undang ini juga menekankan harus adanya standar pelayanan bagi pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan indikator dari keberhasilan sinergi antara riset dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Hal ini dikarenakan pelayanan publik merupakan sebuah titik temu antara birokrasi, realitas sosial serta kebijakan pemerintah. Agar pelayanan publik tetap mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang tiap harinya, pemerintah harus menyediakan pelayanan yang responsif serta basis data hasil kajian akademi (Pertiwi, 2023). Begitu juga sebaliknya, pelayanan publik tidak berdasarkan hasil data dan juga kajian akademik akan berbentuk tidak efektif dan tidak relevan dengan masyarakat. Eksistensi BRIDA dalam hal ini sangat penting, ia berperan sebagai perantara antara praktik-praktik pelayanan publik dan keilmuan akademik. BRIDA mampu memberikan saran saran peningkatan pelayanan bagi pemerintahan melalui riset kebijakan dan evaluasi program yang berbasis bukti nyata.

### **Peran BRIDA Jawa Timur Dalam Perkembangan Inovasi Daerah**

Suatu pemerintah daerah dikatakan berhasil apabila ia mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan memberikan pelayanan yang sesuai dan efektif, terlebih lagi pada saat ini yang mana tiap tiap daerah yang memiliki kewenangan akan daerah mereka masing-masing atau otonomi daerah yang membuat masing-masing daerah saling

bersaing dalam melahirkan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan citra daerah mereka masing-masing (Rifai et al, 2025). Kehadiran BRIDA dalam konteks ini berperan sebagai jembatan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dengan berdasarkan data atau knowledge based development. BRIDA juga bertugas dalam menghubungkan antara hasil-hasil riset para peneliti dengan sistem yang ada di pemerintahan agar kebijakan yang dihasilkan bersifat adaptif dan efisien, serta mampu memecahkan problematika dan kesenjangan pembangunan yang ada di pemerintah daerah (Lubis et al, 2024).

Berdirinya BRIDA sendiri merupakan bentuk implementasi atas kebijakan nasional yang menggabungkan fungsi kelitbangan di daerah ke dalam struktur kelembagaan riset nasional dengan koordinasi bersama Badan Riset Nasional (BRIN) dalam mengembangkan riset dan inovasi di Indonesia (Fitria, 2021). Selain berfungsi sebagai jembatan antara peneliti atau inovator dan pemerintahan, BRIDA juga berfungsi sebagai fasilitator dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kegiatan ini tampak dalam program-program pengembangan serta upaya penyebarluasan inovasi daerah. Teknologi sederhana namun inovatif seperti sistem pengolahan limbah sampah merupakan sebuah contoh kecil dan konkrit dari inovasi yang didorong oleh BRIDA dengan kolaborasi antara inovator dengan para akademisi serta para pelaku industri. Selain itu BRIDA juga terlibat dalam upaya penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang dibuka dengan menyediakan kelas-kelas bimbingan. Kelas ini merupakan bentuk bimbingan yang diberikan oleh BRIDA kepada perangkat daerah atau para inovator untuk dapat mengembanga inovasi yang mereka miliki agar dapat mengikuti kompetisi inovasi, melalui kompetisi tersebut hasil inovasi yang menyanggah gelar juara inovasi terbaik akan mendapat bimbingan lebih lanjut agar mampu dikembangkan leboh lanjut lagi. Dengan adanya bimbingan yang telah dilakukan maka inovator akan lebih terarah dan tau akan dibangun seperti apa kedepanya akan hasil temuannya (Kartika & Simorangkir, 2019).

### **Sinergi Riset dan Inovasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik**

Dalam pemerintahan di tingkat daerah peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tujuan strategis yang harus dijalankan. Sinergi antara inovasi dan riset merupakan sebuah kunci dalam melahirkan kebijakan yang efektif dan relevan pada masyarakat yang dinamis pada saat ini guna memenuhi tantangan globalisasi (Asmara, 2016). Proses pembuatan kebijakan yang berdasarkan dengan hasil data dan penelitian pada masyarakat merupakan contoh konkret dalam sinergi antara riset dan juga inovasi. Dalam konteks pengambilan kebijakan BRIDA JAwa Timur berperan aktif dalam menginisiasi penelitian terhadap objek yang dirasa penting dan vital di tengah masyarakat seperti pada bidang kependudukan, pendidikan, lingkungan, serta kesehatan masyarakat. Kajian yang dilakukan tidak hanya berbentuk konseptual saja akan tetapi juga bersifat adaptif yang mana data yang diambil bersifat empiris dan mempertimbangkan kebutuhan di daerah.

Dengan melakukan pendekatan penelitian yang berbasis dengan kebutuhan daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat membentuk kebijakan layanan yang tidak semata mata berdasarkan intuisi birokratik akan tetapi juga berdasarkan landasan ilmiah yang konkrit (Maulana, 2022). Contohnya, dalam pengembangan sistem layanan berbasis digital seperti E-Samsat, BRIDA berperan dalam menilai tingkat kebutuhan pengguna, efisiensi sistem tersebut, serta memberikan masukan dalam peningkatan layanan tersebut agar lebih efektif. Inovasi dalam pelayanan publik tidak hanya memiliki arti penggunaan teknologi canggih, akan tetapi lebih pada penerapan solusi yang relevan serta sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat lokal (Sabeni & Setiamandani, 2020). Dalam hal ini, BRIDA Jawa Timur berperan dengan memberikan fasilitas kepada inovator di daerah, termasuk yang berasal dari perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Dengan perpaduan antara pemerintahan dengan pihak eksternal seperti para akademisi, perguruan tinggi, pelaku usaha dan juga komunitas masyarakat, maka sinergi riset dan inovasi dapat terbentuk secara efektif dan responsif (Wahyuni et al, 2025). Dengan kolaborasi tersebut inovasi pelayanan publik yang dihasilkan dapat dibangun dengan berdasarkan dialog yang ada antara innovator dan pemerintah sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Berbagai macam kolaborasi yang dihasilkan oleh BRIDA berupa adanya forum replikasi, kerjasama antar OPD atau perguruan tinggi, serta kompetisi inovasi daerah merupakan bentuk konkrit dari upaya yang telah dilakukan BRIDA. Melalui kolaborasi tersebut proses saling bertukar ide atau pengetahuan dapat berlangsung, sehingga proses pengembangan pelayan publik yang berkualitas dapat mengalami percepatan. Sinergi riset dan inovasi yang efektif harus didukung oleh proses pendampingan dan evaluasi yang intens untuk melahirkan pelayanan yang lebih baik (Asmara, 2016). BRIDA Jawa Timur juga telah membentuk indikator-indikator keberhasilan untuk meninjau peningkatan layanan berdasarkan efisiensi, efektivitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Hasil evaluasi yang telah dilakukan tidak hanya untuk keperluan akuntabilitas, tetapi juga untuk mereplikasi dan memperluas gagasan atau inovasi yang telah ada ke daerah lain di Indonesia.

Perpaduan antara riset dan juga inovasi merupakan suatu bentuk ekosistem yang saling melengkapi satu sama lain. Keduanya saling memberikan dampak dan memiliki peran masing-masing dalam pengambilan kebijakan publik, riset berperan sebagai penyedia basis pengetahuan sementara inovasi merupakan sebuah perwujudan dari hasil inovasi tersebut menjadi sebuah tindakan. Pada masyarakat yang dinamis dan terus berkembang setiap saat kedua elemen ini sangat berperan penting dalam setiap perkembangan bidang kehidupan (Prasodjo, 2017). Ekosistem ini tak hanya melibatkan para akademisi dan juga peneliti, tetapi juga para pelaku usaha, pemerintahan, dan masyarakat umum yang sama-sama saling berkontribusi. Tanpa adanya riset ilmiah inovasi akan kehilangan pondasi utamanya begitu juga sebaliknya, tanpa adanya inovasi riset hanya akan menjadi hasil penelitian saja tanpa ada implementasi terhadap masyarakat.

Dalam mengapresiasi hasil riset dan inovasi yang telah dikembangkan oleh masyarakat Jawa Timur serta untuk menggugah jiwa saing masyarakat dalam hal inovasi, BRIDA Jawa Timur membentuk sebuah kompetisi award untuk memberikan penghargaan

kepada inovasi yang paling unggul. Tak hanya unggul dalam hal kebaruan ide, melainkan juga unggul dalam hal kebermanfaatannya bagi masyarakat luas, kemudahan akses, serta teknologi yang ada di dalamnya. Kompetisi tersebut ialah Inovasi dan Teknologi (INOTEK AWARD) yang mana kompetisi ini juga merupakan sebuah program kerja unggulan dari BRIDA Jawa Timur. Kompetisi ini telah melahirkan banyak inovasi baru di berbagai bidang, kompetisis ini sendiri memiliki lima bidang penghargaan yakni;

- a. Kategori Inovasi daerah atau ASN, kategori ini diperuntukan kepada pemerintah daerah baik kota atau kabupaten. Kategori ini dapat berupa sistem tata kelola pemerintah daerah (inovasi dalam bentuk pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen), inovasi pelayanan publik (inovasi dalam bentuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik), atau inovasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Beberapa contoh inovasi yang tergolong dalam kategori ini adalah Elektronik Kendali Daerah (E\_KENDA) milik pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, Akurasi Data Kependudukan (KURSI TANDU) milik pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso, dan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat (Aplikasi Padat Karya Kota Surabaya).
- b. Kategori inovasi berbasis website atau mobile apps, merupakan kategori yang dapat berupa gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk dan/atau jasa yang dapat diakses melalui internet. Contoh dari inovasi ini adalah Aplikasi Wisata dan Layanan Pengantaran (ATERAGIH), Aplikasi Manajemen Pengelolaan Budidaya Ikan (SI PATIN), Aplikasi Jatim Berdasi, Simbok (Sistem Informasi Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan), My Retribusi (Executive Dashboard Monitoring Retribusi Daerah).
- c. Kategori inovasi pada bidang agribisnis dan energi baru terbarukan, kategori ini merupakan inovasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan atau pemanfaatan sumberdaya alam lain dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Serta pada bidang Energi Baru Terbarukan yang merupakan inovasi yang bertujuan mencari solusi alternatif sumber energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Contoh dari kategori ini adalah Metode Pengembangan Bibit Sapi Madura Secara Simultan (SANG SULTAN), Mesin Extruder Pelet Ikan dengan Electric Control Feeding Cutting dan Auto Control Water Temperature, Wes Joss (Wujudkan Revolusi Pangan Lokal Dengan Olahan Jamur Organik Solusi Stunting), Bagaspati (Budidaya Jagung Sebagai Ketahanan Pangan Nabati) Sebagai Upaya Nyata Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Penyediaan Benih Jagung Yang Mandraguna.
- d. Kategori inovasi sosial budaya dan kependudukan, kategori ini merupakan inovasi sosial yang melibatkan elemen masyarakat dan/atau budaya maupun adat istiadat yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan setempat. Contoh dari

kategori ini adalah Inovasi pemberdayaan masyarakat (Masyarakat pesisir, Kelompok Tani), Inovasi pemberdayaan masyarakat (Masyarakat pesisir, Kelompok Tani).

- e. Kategori Millennial, merupakan sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk dan jasa baik berbasis digital maupun non digital dari kaum millennial yang diharapkan untuk mendukung peningkatan ekonomi atau membuka lapangan kerja bagi kaum millennial. Contoh dari kategori ini adalah Bumi Baik (Kalkulator Karbon), Paktukang (Solusi untuk dapat jasa tukang terbaik di kotamu), GL++ (Software akuntansi online terpercaya).

Melalui kompetisi ini BRIDA Jawa Timur telah berhasil melahirkan dan membimbing para OPD atau masyarakat sebagai inovator dalam melahirkan inovasi baru yang tepat. Pada tahun 2025 kompetisi ini akan diadakan kembali oleh BRIDA Jawa Timur dengan tema acara "Inovasi Untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Melalui kompetisi ini inovasi yang telah lahir dan menyanggah gelar juara akan mendapatkan beberapa keuntungan yang berupa pemberian dana pembinaan, pengurusan hak cipta, serta berpeluang untuk maju ke dalam inovasi unggulan Jawa Timur yang akan diberikan penghargaan langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Dengan begitu pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan dengan menggandeng hasil inovasi yang telah unggul, hal ini merupakan salah satu indikator good governance baik dengan melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan (Manganti, 2023).

Sambar Petir (Sampah Berkah Untuk Penataan Lingkungan Berseri) merupakan salah satu inovasi yang mendapat gelar juara dalam kompetisi INOTEK AWARD tahun 2024 pada kategori sosial budaya dan kependudukan. Inovasi Sambar Petir sendiri merupakan inovasi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Malang yang diprakarsai oleh Kepala Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari yakni H. Nanik Dwi Martya. Inovasi ini merupakan inovasi yang lahir dari Unit Bersih Berseri dan Unit Bak Sampah Bumdes Tirto Maju Bersama Desa Tunjungtirto. Dalam pelaksanaannya inovasi ini memiliki beberapa skema khusus, pertama masyarakat setempat akan menukarkan sampah mereka yang nantinya mereka akan mendapatkan poin dari sampah yang mereka tukarkan, poin tersebut akan masuk kedalam kartu mereka yang mana poin tersebut juga terintegrasi dengan pelayanan Bumdes yang lainnya seperti ditukarkan dengan pelayanan klinik, atau ditukarkan dengan berbelanja di minimarket serta pujasera. Sampah yang telah terkumpul tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian, sebagian sampah akan diolah untuk produk kerajinan atau diolah dalam bentuk kostum unik untuk kegiatan karnaval. Sedangkan bagian lainnya akan diolah kembali oleh pihak TPS3R.

### **Peran BRIDA Dalam Prespektif AGIL Talcott Parsons**

Sebagai respons terhadap dinamika pelayanan publik yang terus berkembang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BRIDA memfokuskan perannya sebagai fasilitator inovasi berbasis riset dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan teoritis AGIL yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana sistem sosial seperti BRIDA berfungsi dalam memenuhi keempat dimensi utama yang

menopang keberlanjutan dan efektivitas institusional. Keempat dimensi ini—Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency—dalam konteks BRIDA dapat dikaitkan dengan penyusunan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan mutu layanan publik, pembentukan jejaring antar lembaga daerah, dan penguatan SDM birokrasi.

Dalam skema AGIL, adaptation (A) mengacu pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan eksternal dan mengalokasikan sumber daya untuk merespons perubahan. BRIDA menjalankan fungsi ini melalui kebijakan inovasi yang berbasis kebutuhan masyarakat lokal, terutama dalam merespons permasalahan aktual seperti pelayanan kesehatan digital, pendidikan inklusif, dan UMKM berbasis teknologi. Melalui kegiatan seperti penjangkaran proposal inovasi dalam INOTEK Award, BRIDA mendorong pengembangan solusi inovatif yang relevan dengan konteks lokal. Penilaian proposal berbasis masalah konkret dari masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan BRIDA telah bergeser dari pendekatan top-down menjadi responsif terhadap aspirasi warga (demand-driven policy). Contohnya, inovasi yang menang dalam INOTEK berasal dari sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti sistem informasi pelayanan desa, sistem tanggap bencana, atau pemanfaatan teknologi IoT dalam pengelolaan air bersih di daerah rawan kekeringan. Ini mencerminkan kapasitas adaptif BRIDA dalam merancang kebijakan inovasi yang kontekstual dan solutif.

Goal attainment (G) merupakan fungsi sistem dalam merumuskan dan mewujudkan tujuan-tujuan kolektif. Parsons menekankan bahwa keberlangsungan sistem bergantung pada kemampuannya dalam mencapai tujuan strategis. Dalam konteks BRIDA, tujuan tersebut diformulasikan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif, cepat, dan efisien. BRIDA berperan dalam menetapkan arah inovasi yang terukur melalui indikator yang digunakan dalam kompetisi Innovative Government Award (IGA) dan evaluasi internal terhadap kinerja inovasi OPD. Misalnya, OPD yang berhasil menerapkan hasil riset menjadi prototipe layanan digital mendapatkan pengakuan dan pembinaan lebih lanjut. Target BRIDA bukan hanya kuantitas inovasi, tetapi transformasi konkret terhadap mutu pelayanan. Kualitas pelayanan juga ditingkatkan dengan pendampingan teknis kepada OPD yang belum mampu mengembangkan inovasi secara mandiri, menunjukkan bahwa fungsi goal attainment dilaksanakan secara simultan dengan peningkatan kapasitas internal pemerintah daerah.

Fungsi integration (I) dalam teori AGIL menyangkut kemampuan sistem untuk menjaga kohesi dan kerja sama antar elemen dalam sistem sosial. BRIDA menjalankan fungsi ini dengan memperkuat jejaring antar lembaga daerah dalam mendukung suksesnya ajang IGA dan INOTEK Award. Salah satu contohnya adalah kolaborasi dengan Millennial Job Center (MJC), yang difasilitasi untuk mendorong partisipasi generasi muda dalam kompetisi inovasi. Melalui pendekatan quadruple helix (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat), BRIDA memperluas basis partisipasi inovator, menciptakan sinergi antara ide-ide segar generasi muda dan kebutuhan institusional pemerintah. Selain itu, BRIDA juga menggandeng Bappeda, Diskominfo, dan Dinas Pendidikan untuk memperkuat sosialisasi dan implementasi inovasi lintas sektor, ini mencerminkan pentingnya integrasi dalam sistem inovasi daerah.

Latency atau pattern maintenance (L) dalam kerangka AGIL mencakup pelestarian nilai, norma, dan kapasitas sistem untuk mempertahankan kelangsungan budaya organisasi. Dalam konteks BRIDA dan pelayanan publik di Jawa Timur, salah satu tantangan utama dalam menjalankan fungsi ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki orientasi pada inovasi dan kemampuan teknis yang memadai. Sebagian besar aparatur sipil negara masih menunjukkan resistensi terhadap perubahan, atau belum memiliki kompetensi yang memadai dalam pengembangan inovasi berbasis riset dan teknologi. Ini berdampak pada kesenjangan antara ide inovatif dan implementasi praktis di lapangan. Pelestarian nilai inovasi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja birokrasi daerah. Selain itu, efisiensi pemerintahan menjadi tantangan tersendiri dalam menopang fungsi laten. Dalam banyak kasus, efisiensi prosedural belum diiringi efisiensi struktural, menyebabkan implementasi inovasi memerlukan waktu dan koordinasi lintas OPD yang lambat.

### **Tantangan BRIDA Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik**

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh BRIDA Jawa Timur dengan melakukan sinergi antara riset dan inovasi tidak akan lepas dengan berbagai tantangan yang muncul baik dalam hal struktural, kultural maupun teknologis. Dalam upaya peningkatan ini diperlukan transformasi pelayanan publik yang berbasis data yang bersifat inklusif, pembuatan strategi jangka panjang tentang juga perlu diperhatikan guna ide-ide yang telah ada untuk inovasi pelayanan publik agar dapat berjalan di tempat dan tidak hanya diam di tempat tanpa ada langkah lanjutan yang diambil. Kualitas SDM serta praktik birokrasi menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan ini, lemahnya koordinasi pada OPD di daerah juga mempersulit BRIDA dalam mengajak dan membimbing pemerintah daerah agar ikut berkontribusi dalam upaya ini. Keterbatasan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Karena faktor utama dalam stagnasi pelayanan publik ialah rendahnya kapabilitas ASN dalam memahami siklus riset serta manajemen inovasi yang tepat (Pratiwi et al, 2022).

Anggaran yang tidak mencukupi merupakan tantangan baru yang dihadapi oleh BRIDA pada saat ini, dengan munculnya kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran pada badan pemerintahan sangatlah mempengaruhi semua bidang pemerintahan tidak terkecuali pada BRIDA Jawa Timur. Berbagai macam program kerja yang sudah terencana dan menjadi program kerja rutin tahunan sebagian terpaksa tidak dapat dijalankan lantaran tidak adanya biaya operasional. Berbagai macam pertemuan atau rapat sosialisasi dengan pemerintah daerah dan juga inovator di daerah juga sebagai terpaksa dialihkan menjadi rapat online, walaupun proses koordinasi dengan pemerintah dan inovator masih dapat berlangsung tentunya tidak akan terasa sama apabila dilakukan secara offline. Selain pada ekosistem BRIDA sendiri para pemerintah daerah yang memiliki inovasi yang ingin dijalankan juga akan terkendala untuk melanjutkan inovasi tersebut di tengah menipisnya anggaran yang mereka miliki, hal ini akan menjadi faktor utama menurunnya partisipasi dari para OPD atau masyarakat dalam mengikuti kompetisi INOTEK AWARD.

Keterbatasan anggaran ini menjadi penghambat yang cukup besar dalam upaya mengembangkan dan mengimplementasikan ide kreatif yang seharusnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini membuat para pemerintah daerah lebih fokus untuk menjalankan program-program dasar mereka dan mengesampingkan program kerja inovatif yang dirasa tidak terlalu mendesak bagi mereka. Pemeliharaan infrastruktur, gaji para pegawai, serta pelayanan dasar masyarakat menjadi fokus utama dari alokasi dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga alokasi dana untuk kegiatan riset dan inovasi terkesampingkan. Dalam menghadapi permasalahan seperti ini perlu dilakukan pendekatan secara komprehensif yang tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Strategi yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain, dengan begitu pemerintah daerah tetap mampu menjalankan gagasan inovasi yang mereka miliki tanpa rasa khawatir memikirkan sumber dana terbatas yang diberikan oleh pemerintah pusat.

## Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan seperti INOTEK AWARD telah berhasil mendorong berbagai elemen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka dan mendorong masyarakat dalam mengembangkan hasil temuan inovasi yang mereka temukan. Dengan memberikan apresiasi terhadap lembaga atau masyarakat yang memiliki inovasi yang menarik dan bermanfaat merupakan salah satu bentuk upaya mendorong kemajuan pada masyarakat. Dengan menggaet berbagai macam pihak masyarakat dalam mengembangkan pelayanan publik merupakan sebuah permulaan yang bagus untuk tercapainya prinsip good governance. Dengan begitu kebijakan yang dihasilkan merupakan sebuah jawaban dari kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Temuan yang didapat memberikan penekanan bahwa sangat penting untuk memperhatikan kondisi masyarakat secara langsung dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Pengambilan keputusan yang hanya berdasar untuk memenuhi kewajiban tanpa memperhatikan pihak-pihak yang menjadi tujuan keputusan tersebut hanya akan membawa hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh BRIDA Jawa Timur dalam menggelar ajang kompetisi inovasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir munculnya keputusan atau kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan. Diharapkan hal ini dapat menjadi titik untuk meningkatkan rasa kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka

- Agustinus, & Sahatapy. (2022). Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Good and Clean Governance). *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (Jssh)*. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.82-88>
- Asmara, Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul Di Indonesia. *Journal of Public Sector Innovation*, 1(1), 37–46.
- Engkus, Azan, A., Hanif, A., & Fitri, A. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*.
- Finanda, A. S., Fadhila, J. F., & Hayat, H. (2024). Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik. *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 74–78. <https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.74-78>
- Fitria, N. J. L. (2021). Pembentukan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Sebagai Upaya Menuju Good Governance Dengan Prinsip Reformasi Birokrasi. *Wacana Publik*, 15(02), 105. <https://doi.org/10.37295/wp.v15i2.62>
- Haniyuhana, A., & Widiyarta, A. (2023). Penerapan Evidence Based Policy Dalam Implementasi Program Smart Village Evidence Based Policy Of Smart Village Program Implementation. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 1). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Iskandar, J., Nur Fajriah, A., Dwi Rahmawati, A., & Sofiani, A. (n.d.). Etika Birokrat Dalam Pelayanan Publik. In *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 18, Issue 3). <http://jurnaldialektika.com>
- Judijanto, L., Damnik, F., Kusnadi, I., Ahmadun, & Leuwol, N. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga. *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- Kartika, R., & Simorangkir, G. (2019). Efektivitas Bimtek Fasilitator dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah. *Jakarta Pusat, Indonesia Dikirim: 26 Juni, Direvisi*(132), 30. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.119-131>
- Lestari, R., & Santoso, S. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2.
- Lidya Lubis, K., Angraini, M., Apriyaningsih, L., Jend Gatot Subroto Km, J., Sikambing, S., Medan, K., & Sumatera Utara, P. (2024). Tinjauan Hasil Riset Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Brida) Dalam Mendukung Pembangunan Kota Medan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4, 130–141. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i4.1828>
- Manganti, G. S. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(11). <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>
- Maulana, R. (2022). COLLABORATIVE Digital Transformation Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2).
- Pertiwi. (2023). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik responsif gender. *JGEDSIC Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children JGEDSIC*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1>

- Ponto, I. S., Patty, J. T., & Sakir, A. R. (2024). Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Penerapan Good Government untuk Menciptakan Birokrasi yang Efisien. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 14(2), 112–124. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4952>
- Prasodjo, T. (2017). Tata Kelola Administrasi dan Pengembangan Desa Inovatif Berbasis Riset. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 4(1).
- Pratiwi, S., Faradila, N., & Iashania, Y. (2022). Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. In *Nusantara Innovation Journal* (Vol. 1, Issue 1).
- Rifai, A., Hayat, & Anadza, H. (2025). Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam Optimalisasi Pelayanan Publik. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 6(2), 269–285. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.2044>
- Sabeni, H., & Setiamandani, E. D. (2020). Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 43. [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Septiani, A., Syamsir, S., Aulia, A. R., Resti, A., Fazira, V., Sukma Wijaya, D. A., & Aldeo, Z. (2022). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(5), 302. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i5.183>
- Siti, N., Program, M., Bisnis, S. A., & Kridatama Bandung, P. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. In *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI* (Issue 1).
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance Innovation of Policy in Public Administration Perspective toward the realization of Good Public Policy Governance. *Spirit Publik*, 12(2).
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326>
- Trisakti, F., Dikeu Dewi Berliana, A., Bukhori, A., Fitri, A., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (n.d.). TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM. In *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 19, Issue 1). <http://jurnaldialektika.com>
- Wahyuni, L., Desy Musdiana, A., Lastri, N., & Dewi, E. P. (2025). Collaboration of Government, Academics, and Communication Through Collaborative Governance to Strengthen Regional Competitiveness. In *Journal of Comprehensive Science* (Vol. 4, Issue 9).